



KEPUTUSAN WALI KOTA

Nomor 000.7.2 / 298 / 2026

Lampiran VI

PERUBAHAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 298 / 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026;
a. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
b. Bab IV : Penutup.



- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

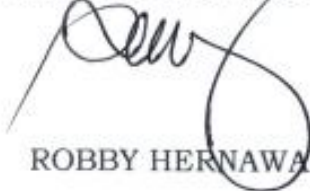
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 September 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TW I TAHUN 2026 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW I dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 14

2.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

3.1. Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026 26

3.2. Rencana Kerja Mendukung IKU dan IKK..... 26

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 29

BAB IV PENUTUP..... 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SALATIGA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Renja PD disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan tugas BKPSDM meliputi penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan kinerja ASN, pengembangan karier, mutasi dan promosi ASN, penilaian kompetensi, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026, terdapat dinamika dan perkembangan kebutuhan yang memerlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan, baik berupa hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyesuaian target kinerja, perubahan kebijakan, maupun kebutuhan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 agar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, efisien,

dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyesuaian perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Salatiga dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan penyelenggaraan manajemen ASN.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja tahun 2026 adalah:

- a. Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 serta perkembangan kebutuhan organisasi;
- b. Menyelaraskan perencanaan kinerja dan pendanaan dengan perubahan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029;
- d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2026.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026
- 3.2 Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU, dan IKK
- 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2026 sampai dengan triwulan II Tahun 2026. Evaluasi tersebut merupakan proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan terhadap capaian Renja BKPSDM Tahun 2026 secara keseluruhan. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II. Hasil Evaluasi disajikan dalam tabel E.81 sebagai berikut :

Tabel E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDM Kota Salatiga
S/d Triwulan II Tahun 2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9=(6+7)	9	10=(4+8)	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	31.961.829.020	100	6.375.994.793	100	6.386.431.840	100	1.661.775.022	100	1.661.775.022	100	3.348.551.032	100	3.348.551.032	100	0,10
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,9		83,6		87,55		-		85,64		85,64		85,64		99,43	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,3		79,92		79,92		-		79,85		79,85		79,85		99,44	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100	28.273.760.790	100	5.837.041.373	100	6.049.805.856	100	1.616.455.627	100	1.619.196.936	100	3.235.652.563	100	3.235.652.563	100	0,11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	26.824.244.258	43	5.819.761.373	43	5.760.189.722	38	1.553.022.851	38	1.548.785.254	38	3.101.808.105	38	3.101.808.105	100	0,12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1.449.516.532	1	17.280.000	1	289.616.134	-	63.432.776	-	70.411.682	-	133.844.458	-	133.844.458	-	0,09

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7)		10=(4+8)		11					
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100	75.000.000	100	13.817.053	100	10.000.000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	75.000.000	1	13.817.053	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	1.119.092.869	100	158.530.207	100	137.627.184	100	19.141.100	100	33.721.978	100	52.863.078	100	52.863.078	100	0,05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15	27.999.900	3	7.938.847	3	3.810.100	-	-	-	988.800	-	988.800	-	988.800	-	0,04
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	25.000.000	2	6.931.335	2	2.737.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25	258.652.000	5	41.708.100	5	21.566.200	-	-	-	17.386.026	-	17.386.026	-	17.386.026	-	0,07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	55.111.500	2	5.230.485	2	10.802.584	-	224.100	-	3.200.000	-	3.424.100	-	3.424.100	-	0,062

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9=(6+7)		10=(4+8)		11	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	13.000.000	1	1.500.000	1	990.000	-	-	-	240.000	-	240.000	-	240.000	-	2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	730.329.469	1	91.681.440	1	97.721.000	-	18.917.000	-	11.907.152	-	30.824.152	-	30.824.152	-	4
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	540.256.000	100	75.444.479	100	90.200.000	100	12.639.365	100	13.770.360	100	26.409.725	100	26.409.725	100	5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	7.200.000	1	1.689.200	1	200.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	0,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5	533.056.000	1	73.755.279	1	90.000.000	-	12.624.365	-	13.755.360	-	26.379.725	-	26.379.725	-	5
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100	1.205.755.202	100	223.556.295	100	98.798.800	100	13.538.930	100	20.086.736	100	13.538.930	100	13.538.930	100	3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7)		10=(4+8)		11					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	685.233.900	13	99.253.817	13	92.098.800	-	13.538.930	-	16.716.736	-	13.538.930	-	13.538.930	-	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	275	99.080.000	22	14.470.000	9	6.700.000	-	-	-	3.370.000	-	3.370.000	-	3.370.000	-	3
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	80	3.859.136.058	75,8	756.934.489	75,8	401.820.000	-	47.675.000	-	62.848.000	-	110.523.000	75,8	110.523.000	95	3
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terlaksana	100	532.935.000	100	217.806.989	100	2.000.000	100	-	100	108.000	100	108.000	100	108.000	100	-
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasilkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	85.095.000	1	15.573.065	1	2.000.000	-	-	-	108.000	-	108.000	-	108.000	-	-
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	100	1.015.868.911	100	154.642.066	100	155.260.000	100	47.435.000	-	24.640.000	100	47.435.000	100	47.435.000	100	5
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	5	873.982.411	1	120.036.582	1	155.260.000	-	47.435.000	-	24.640.000	-	72.075.000	-	72.075.000	-	7

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9=(6+7)		10=(4+8)		11	
	Promosi ASN																
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang terlaksana	100	1.923.708.846	100	326.737.272	100	242.760.000	100	-	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	2
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5	1.498.516.146	1	312.658.007	1	215.060.000	-	-	-	37.500.000	-	37.500.000	-	37.500.000	-	3
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125	153.490.000	103	5.537.500	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250	271.702.700	309	8.541.765	35	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	100	386.623.301	100	57.748.162	100	1.800.000	100	240.000		600.000	100	840.000	100	840.000	100	0,22
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5	23.155.200	1	2.975.697	1	1.800.000	-	240.000	-	600.000	-	840.000	-	840.000	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	19	13.831.677.996	59,33	.664.988.719	15	2.201.087.200	-	2.820.000		729.422.500	-	732.242.500	-	732.242.500	-	5,29
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	100	5.128.475.954	100	.824.911.069	100	110.019.000	100	2.820.000		32.572.500	100	35.392.500	100	35.392.500	100	0,69

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7)	10=(4+8)	11							
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	1350	5.128.475.954	1367	1.824.911.069	13	110.019.000	2	2.820.000	53	32.572.500	53	35.392.500	53	35.392.500	3,93	0,69
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	100	8.703.202.042	100	840.077.650	100	2.091.068.200	100	-	100	696.850.000	100	696.850.000	100	696.850.000	100	8
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	8.703.202.042	1	840.077.650	1	2.091.068.200	-	-	-	696.850.000	-	696.850.000	-	696.850.000	-	8

Sumber : Olah data (2026)

Berdasarkan pada Tabel E.81 di atas, secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, capaian realisasi kinerja maupun penyerapan anggaran masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan dan penyusunan administrasi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat rutin, terutama yang mendukung operasional perangkat daerah, menunjukkan realisasi yang relatif sesuai dengan target Triwulan II. Sementara itu, beberapa kegiatan yang bersifat tidak rutin masih menunjukkan capaian yang terbatas sehingga akan direalisasikan secara bertahap sesuai jadwal pelaksanaan.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat kendala yang bersifat mendasar dalam pencapaian target kinerja. Adapun beberapa hambatan yang ditemui lebih disebabkan oleh faktor waktu pelaksanaan kegiatan, proses administrasi, dan penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan instansi terkait. Oleh karena itu, BKPSDM akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dan penyerapan anggaran sampai akhir Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya akan disajikan data pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja BKPSDM Kota Salatiga.

Tabel E.70
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
 Perangkat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V			
2	Pengolahan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat		V		
9	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota		V		
10. a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		V		
10. b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
10. c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			
10. d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/ wali kota	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
	Perangkat Daerah kabupaten/ kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah disahkan	V			

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan profesional, BKPSDM Kota Salatiga memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang meliputi pengadaan, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, pembinaan disiplin, penilaian kinerja, kesejahteraan, serta pengelolaan data kepegawaian. Seiring dengan dinamika regulasi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM sebagai berikut.

a. Tingkat Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum, kinerja pelayanan BKPSDM Kota Salatiga telah menunjukkan hasil yang baik dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang manajemen ASN. Hal tersebut tercermin dari terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, manajemen talenta, penilaian kompetensi, serta pengelolaan data kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan tetap diperlukan untuk mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang profesional, akuntabel, berbasis merit, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

b. Permasalahan dan Hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya perencanaan kebutuhan ASN yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan organisasi;

- 2) Belum optimalnya penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk pengembangan karier, promosi, mutasi, dan penerapan Manajemen Talenta;
 - 3) Belum optimalnya penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN sebagai instrumen dalam mendukung penerapan Manajemen Talenta, penyusunan profil kompetensi ASN, pengembangan karier, serta penempatan ASN secara tepat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
 - 4) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi Asesor SDM Aparatur dalam mendukung penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN secara profesional, objektif, dan akuntabel.
 - 5) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan pelayanan publik.
 - 6) Belum optimalnya pengelolaan kinerja, disiplin, dan pembinaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
 - 7) Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.
- c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Nasional

Keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Salatiga memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota Salatiga, khususnya Misi ke-3, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, BKPSDM tidak memiliki program yang secara khusus ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. Meskipun demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kota Salatiga tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang profesional dan berbasis sistem merit serta peningkatan kompetensi ASN.

d. Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi BKPSDM Kota Salatiga antara lain meningkatnya tuntutan profesionalisme ASN, percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, penerapan manajemen talenta secara optimal, serta kebutuhan peningkatan kompetensi ASN sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain semakin berkembangnya sistem informasi kepegawaian, dukungan kebijakan pemerintah dalam penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta, meningkatnya kolaborasi dengan instansi pembina, serta pemanfaatan metode pembelajaran berbasis digital untuk memperluas akses pengembangan kompetensi ASN.

e. Rekomendasi Isu Strategis

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, beberapa rekomendasi strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan BKPSDM pada Perubahan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan penilaian kompetensi ASN sebagai instrumen dalam mendukung penerapan Manajemen Talenta, penyusunan profil kompetensi ASN, pengembangan karier, serta penempatan ASN secara tepat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- 3) Penguatan kapasitas dan pengembangan SDM Asesor Aparatur;
- 4) Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan transformasi digital;
- 5) Penguatan tata kelola data dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas;
- 6) Optimalisasi pengelolaan karier, kinerja, disiplin, dan pembinaan ASN untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Proses review dilaksanakan dengan membandingkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan BKPSDM Kota Salatiga yang disusun

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja perangkat daerah, perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kebutuhan penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran. Selanjutnya, hasil review tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2026

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			9.005.364.040	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			9.108.463.261
Bidang Urusan Kepegawaian			6.804.359.040	Bidang Urusan Kepegawaian			6.907.458.261
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,55	6.407.934.040	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,55	6.481.463.261
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,95			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,95	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1	6.026.308.856	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1	6.026.308.856
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	5.760.189.722	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	5.760.189.722
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	266.119.134	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	266.119.134

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	10.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	10.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1	161.626.384	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1	235.155.605
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	3.810.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	3.810.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2.737.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2.737.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	21.566.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	21.566.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	13.302.584	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	13.302.584

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.490.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.490.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	118.720.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	192.249.421
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	91.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	91.200.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	90.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1	118.798.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	118.798.800

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	107.188.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	107.188.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	11.610.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	11.610.000
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	76	396.425.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	76	425.995.000
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	18.025.000	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	18.025.000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	16.025.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	16.025.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	2.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	2.000.000

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksana kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1	177.060.000	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksana kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1	206.630.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	177.060.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	206.630.000
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	1	198.190.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	1	198.190.000
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	194,140,000	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	194,140,000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12	4,050,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12	4,050,000
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	3,150,000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	3,150,000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	3,150,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	3,150,000

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan			2.201.005.000	Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan			2.201.005.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	15	2.201.005.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	15	2.201.005.000
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	1	426.615.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	1	426.615.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	65	426.615.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	65	426.615.000
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1	1.774.390.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1	1.774.390.000

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
PelaksanaanSertifikasiK ompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	1.774.390.000	PelaksanaanSertifikasiK ompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	1.774.390.000

Sumber : Olah data (2026)

Berikut rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai
rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan

No	Rekapitulasi	Rancangan Perubahan RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4
1	Jumlah Program	3	3
2	Jumlah Kegiatan	11	11
3	Jumlah Sub Kegiatan	21	21
4	Jumlah Pagu	Rp. 9.005.364.040	Rp. 9.108.463.261

Sumber : Olah data (2026)

Dari tabel di atas, menurut jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan antara rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan, sedangkan untuk pagu bertambah sebesar Rp.103.099.221.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026

BKPSDM Kota Salatiga tidak memiliki program yang secara khusus ditetapkan sebagai Program Prioritas Daerah, Program Strategis Nasional (ProSN), maupun program yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. Selain itu, tidak terdapat direktif khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan BKPSDM untuk diakomodasi dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

Meskipun demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM Kota Salatiga tetap memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang profesional, berbasis sistem merit, serta peningkatan kompetensi ASN. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, penguatan manajemen talenta, peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN, serta pengembangan inovasi pelayanan kepegawaian yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2. Rencana Kerja Mendukung Pencapaian IKU dan IKK

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029, diperlukan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berdasarkan sistem merit.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BKPSDM Kota Salatiga secara umum diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan

penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya, terutama dalam memastikan kesesuaian antara target, realisasi kinerja, dan dukungan anggaran. Rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi IKU BKPSDM Kota Salatiga sampai dengan TW II tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI s/d TW II 2026
1	2	3	4	5
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,68	0,66
2	Persentase Kinerja ASN minimal Baik	%	95	92,51
3	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP	%	60	30,25
4	Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN	%	85	-

Sumber : olah data 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU BKPSDM Kota Salatiga sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan optimalisasi dan percepatan pencapaiannya pada semester berikutnya.

Indeks Sistem Merit dan Persentase Kinerja ASN minimal Baik menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen ASN. Sementara itu, Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP masih memerlukan peningkatan melalui optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pada periode selanjutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun untuk indikator Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi karena penilaian indikator tersebut dilaksanakan pada akhir tahun. Dengan demikian, belum adanya capaian pada periode Triwulan II bukan menunjukkan tidak dilaksanakannya kegiatan, tetapi karena pengukuran indikator dilakukan pada akhir tahun setelah proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data ASN selesai dilaksanakan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari evaluasi capaian kinerja pelaksanaan urusan kepegawaian, dilakukan pengukuran terhadap IKK BKPSDM Kota Salatiga. Pengukuran IKK dilakukan dengan membandingkan target kinerja Tahun 2026 dengan realisasi yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Adapun hasil pengukuran dan tingkat capaian IKK sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi IKK BKPSDM Kota Salatiga sampai dengan TW II tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI s/d TW II 2026	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,44	76,45	102,70
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,44	24,86	97,72
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,50	99,71	100,21

Sumber : olah data 2026

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Salatiga sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang baik. Dari tiga indikator yang diukur, terdapat dua indikator yang telah melampaui target tahunan, sedangkan satu indikator masih berada sedikit di bawah target yang ditetapkan.

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana Perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 disusun mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 sampai dengan Triwulan II. Dengan demikian, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian rumusan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Pendanaan Perubahan tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			9.108.463.261
A	Urusan Kepegawaian			6.907.458.261
A.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	6.481.463.261
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,55	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,95	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100	6.026.308.856
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	5.760.189.722
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	266.119.134
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100	10.000.000
2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	235.155.605
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3.810.100
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2.737.300
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	21.566.200
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	13.302.584
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.490.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	192.249.421
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	91.200.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.200.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	90.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100	118.798.800
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	107.188.800
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	11.610.000

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
A.2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	76	425.995.000
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terlaksana	100	18.025.000
7.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	16.025.000
7.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	2.000.000
8	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	100	206.630.000
8.1	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	206.630.000
9	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang terlaksana	100	198.190.000
9.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	194.140.000
9.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12	4.050.000
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	1	3.150.000
10.1	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	3.150.000
B	Urusan Pendidikan dan Pelatihan		15	2.201.005.000
B.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	2.201.005.000
11	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	65	426.615.000

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
11.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	426.615.000
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	1	1.774.390.000
12.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	1.774.390.000

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga 2026

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, perkembangan kebijakan pemerintah, dinamika kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah. Perubahan Renja ini menjadi pedoman bagi BKPSDM dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

1. Catatan Penting

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksanaan kegiatan harus senantiasa memperhatikan ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah, perubahan regulasi, maupun kondisi yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah sehingga alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, maka akan dilakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Setiap unit kerja di lingkungan BKPSDM Kota Salatiga bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, serta melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi

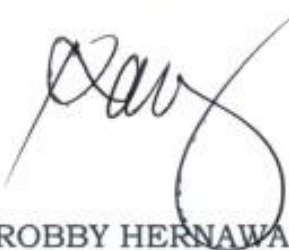
secara berkala terhadap capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan langkah perbaikan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas Perubahan Renja Tahun 2026, BKPSDM Kota Salatiga akan melakukan optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui penguatan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja.

Selain itu, BKPSDM Kota Salatiga akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara melalui penerapan sistem merit, penguatan manajemen talenta, peningkatan kompetensi ASN, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian, serta penguatan kualitas data ASN sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan seluruh target kinerja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

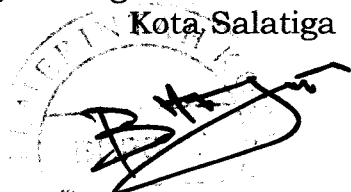
LAMPIRAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan hasil sebagai berikut :

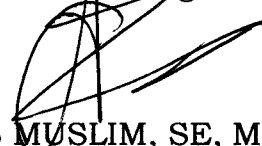
- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 10 Tahun 2025, paling sedikit memuat 4 (empat) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2026;
 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 4. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan Perubahan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada Perubahan RKPD di tetapkan.

Plh. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Salatiga



BAKTI HARJANTI, S. Sos
NIP. 19730905 199803 2 005

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM
NIP. 19740217 200501 1 005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyeba Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	✓			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/ kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		✓		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota.		✓		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/ wali kota.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			

Formulir Verifikasi Sistematika PERUBAHAN RENJA 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓		
I.3	Maksud dan tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026					
II.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, serta realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
	dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.			
II.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.	✓		
II.3	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026	Memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dapat di akses pada link https://bit.ly/perubahan26sl3 .	✓		
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tematik Pembangunan 2026	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
		hal-hal lainnya (direktif pemerintah), antara lain tentang : a. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) b. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga c. Dukungan terhadap pelaksanaan SPM d. Dukungan terhadap Penurunan Stunting e. Dukungan terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrim f. Dukungan terhadap Pelaksanaan SDG's			
III.2	Indikator Kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Uraian tentang upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang diukur melalui IKU, dan IKK dengan mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah pada TW II Tahun 2026	✓		
III.3	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiata serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Memperhatikan indikator kinerja yang telah di tetapkan pada Renstra PD dan RPJMD 2025-2029.	✓		
BAB IV PENUTUP					
IV	Penutup	Berisikan uraian penutup, berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
		rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.			